

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah. 2001. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghana Indonesia.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Media Group.
- , 2011. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2010. *Kebijakan Hukum Pidana dan Perkembangannya Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: PT Kencana.
- CST Kansil dan Cristine ST Kansil. 2004. *Hukum Keuangan dan Perbendaharaan Negara*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Darwan Prinst. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan.
- Eddy OS. Hiarieej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- H. La Ode Husen. 2005. *Hubungan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung: Utomo.
- Hotman P. Sibuea. 2010. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan*. Jakarta: Erlangga.
- Ismail Saleh. 1998. *Ketertiban dan Pengawasan*, Cet. 2. Jakarta: Haji Masagung.
- Jimly Asshiddiqie. 2016. Ahmad Fadhil Sumadi, Achmad Edi Subiyanto, Anna Triningsih, *Putusan Monumental Menjawab Problematika Kenegaraan*. Malang: Setara Press.
- M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Maruarar Siahaan. 2011.*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi 2*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Fauzan. 2010.*Hukum Pemerintahan Daerah, Edisi revisi*. Mojokerto: STAIN Press.
- Munir Fuady. 2006.*Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*. Bandung: Citra Aditya.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- R. Soesilo. 2013.*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- R. Wiyono. 2010.*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ridwan HR. 2011.*Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supriyadi Widodo Eddyono. 2012.*Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Elsam.
- Theodorus M. Tuanakotta. 2009.*Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tim Penyusun. 2008.*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-Empat*. Jakarta: Depdiknas.
- W. Riawan Tjandra. 2014.*Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Grasindo.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
-----Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

----- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

-----Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

----- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik.

C. Jurnal

Abd Razak Musahib, “Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi” dalam jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/katalogis/article/view/4242/31.

Aji, Ahmad Mukri. *"Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam,"* SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 2, Nomor 2, (2015)

Andriani Nurdin, “Keterangan Saksi Disidang Dalam Perkara Pidana Yang Disangka Palsu berdasarkan Pasal 174 KUHP”, *Varia Peradilan* Tahun XXVII Nomor 328 Desember 2013.

Ardi Nur Mubarak dkk, “Implementasi Putusan Mk 31/PUU-X/2012 Jo. Sema 4 Tahun 2016 Dalam Putusan Pengadilan Tipikor”, Prosiding Nasional Hukum Aktual Hukum Internasional dalam Perspektif Islam.

Bagir Manan, “Seandainya Saya Hakim Bank Century”, *Varia Peradilan* Tahun XXX Nomor 349 Desember 2014.

Guntur Rambey, “Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda”, *Jurnal De Lega Lata, Volume I, Nomor 1, Januari – Juni 2016*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2016.

Irwan Adi Cahyadi. “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam hukum positif di Indonesia”, *Journal Universitas Brawijaya*, 2014.

Iskandar Muda, “Tindak Lanjut Lembaga Negara Pembentuk Undang-Undang terhadap Pesan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Journal Konstitusi*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Vol 20 No. 1, 2023.

Machmud Aziz, “Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 5, 2010.

Malik, “Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final Dan Mengikat”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6 No. 1, 2009.

- Mirza Satria Buan, Ahmad Fikri Hadin, Shinta Dwi Muchtar, “Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Banua Law Review*, Universitas Lambung Mangkurat, 2023.
- Nurfaqih Irfani,” Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum”, *Journal Legislasi Indonesia*, Vol. 16 No. 3, 2020.
- Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang”, *Jurnal Yuridika*, Volume No. 5 & 6, Tahun XII, September – Desember, 1997.
- R. Bayu Ferdian, dkk, “Penetapan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Syiah Kuala Law Journal*: Vol. 2(3) Desember 2018).
- Siti Nurhalimah, “Penghapusan Pidana Korupsi Melalui Pengembalian Kerugian keuangan negara”, *Jurnal ADALAH*, Buletin Hukum dan Keadilan, Volume 1 Nomor 11c (2017).
- Qomaruddin, “Pembentukan Undang-Undang dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Journal Legislasi Indonesia*, Vol 6 No. 4, 2009.

D. Artikel

- BPK Sinergi Cara Strategi Cegah Korupsi, Warta BPK edisi Januari 2011, Terdapat Dalam, http://www.bpk.go.id/assets/files/magazine/edisi-01-voli-januari2011_halaman_6_27_.pdf, Terakhir diakses tanggal 15 Oktober 2024.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/siapa-berwenang-menyatakan-kerugian-negara-sema-puntak-mengikat-lt58ac1253a9228/> diakses pada 11 November 2024.
- Ilyas, W. B, “Posisi Hukum Akuntan Publik: Menghitung Kerugian Keuangan Negara”, [Media Online]. Retrieved November 23, 2022, from <https://www.neraca.co.id/article/154349/posisi-hukum-akuntan-publik-menghitung-kerugian-keuangan-negara#>
- Novrieza Rahmi/ASH, “Siapa Berwenang Menyatakan Kerugian Negara? SEMA pun Tak Mengikat”, diakses melalui <https://www.hukumonline.com>, 22 Oktober 2024.